RINGKASAN

Meiriska Yolanda Br Bangun
Nim. 220510315

Perlindungan Hukum Atas Hak Hibah (*Pemere Keleng Ate*) Anak Perempuan Yang Dilakukan Secara Lisan (Studi Penelitian Di Desa Lau Tepu Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara)
(Dr. Herinawati, S.H., M.Hum, dan Dr. Ramziati, S.H., M. Hum)

Dalam adat Karo yang menganut sistem patrilineal, anak laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris utama.Namun, anak perempuan dapat memperoleh harta orangtua melalui hibah yang diberikan semasa orang tua masih hidup. Pelaksanaan hibah kepada anak perempuan di Desa Lau Tepu dilakukan berdasarkan pemberian orang tua, tetapi dalam praktiknya terjadi konflik ketika hibah tersebut tidak terlaksana. Isu hukum yang muncul adalah adanya perbedaan antara anak perempuan dan laki-laki dalam pembagian warisan dengan paktik mengenai pemberian hibah kepada anak perempuan secara lisan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hibah secara lisan, perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai penerima hibah, serta upaya penyelesaian konflik melalui mediasi di pemerintahan desa.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Lau Tepu Kecamatan Salapian. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah secara lisan kepada anak perempuan dilakukan berdasarkan kehendak pemberi hibah, tetapi tidak terlaksana. Perlindungan terhadap penerima hibah dilakukan melalui keterangan saksi serta keterlibatan keluarga, anak beru, tokoh adat, dan pemerintah desa. Penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah dan mediasi secara kekeluargaan dan pemerintah desa hingga diperkuat dengan surat kepala desa yang menerangkan pemberian hibah kepada anak perempuan.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa hibah secara lisan kepada anak perempuan dapat diakui berdasarkan kehendak pemberi hibah dan norma kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat, namun memiliki kelemahan dalam pembuktian. Disarankan agar setiap pemberian hibah, khususnya tanah, dituangkan secara tertulis dan disertai saksi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta mencegah konflik di kemudian hari.

Kata Kunci : *Hibah, Perlindungan Hukum, Anak Perempuan, Adat Karo, Hukum Perdata.*

SUMMARY

Meiriska Yolanda Br Bangun
Nim. 220510315

Legal Protection of Daughter's Rights (*Gift Of Love*) Regarding Oral Grants (A Reseach Study in Lau Tepu Village, Salapian District, Langkat Regency, North Sumatera Province).
(Dr. Herinawati, S.H., M. Hum, and Dr. Ramziati, S.H., M.Hum)

A hibah (gift) is a gratuitous transfer made by one person to another while the donor is still alive. Under civil law, such gifts are regulated by Article 1666 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), while the validity of customary law is recognized under Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, provided it remains in practice, aligns with societal developments, and does not conflict with national law. The issue addressed in this study stems from an oral gift transfer to a daughter in Lau Tepu Village, Salapian District, Langkat Regency, which subsequently triggered a conflict regarding rights to the gifted land.

The research questions focus on how oral gift transfers to daughters are executed under Karo customary law, the nature of legal protection for the recipient, and the efforts to resolve resulting conflicts through mediation in Lau Tepu Village.

The study aims to examine and analyze the implementation of oral gift transfers, the legal protection afforded to daughters as recipients, and conflict resolution efforts via mediation.

The study employs an empirical-juridical method with a descriptive approach, utilizing fieldwork and interviews with relevant parties, supported by pertinent legal materials.

The findings indicate that oral gift transfers to daughters are based on the donor's intent and familial ties but face obstacles when other parties dispute the transfer. Protection for the recipient is facilitated through witness testimony and the involvement of family members, the anak beru (customary in-law group), traditional leaders, and village authorities. Conflict resolution is pursued through amicable deliberation and mediation, ultimately reinforced by an official letter from the village head confirming the gift transfer to the daughter.

The study concludes that oral gift transfers to daughters are recognized based on the donor's intent and prevailing familial norms within the community, though they present evidentiary weaknesses. It is recommended that all gift transfers particularly those involving land be documented in writing and witnessed to ensure legal certainty and protection, thereby preventing future conflicts.

Keywords: Grant, Legal Protection, Daughter, Karo Customary Law, Civil Law.